

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Strategi Counter Disinformation di Era Post-Truth *Citizenship Education as a Counter Disinformation Strategy in the Post-Truth Era*

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Zahra Dwi Pusparini
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: zahradwipusparini15@gmail.com

Hikma Paujia
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: hikmapaujia@gmail.com

Vera Dewi Saputri
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: veradewisaputri877@gmail.com

Hanifa Anan
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: hanifaanan0@gmail.com

Article Info
Received : 10 October 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 29 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: Citizenship Education, Post-truth, Hoax, Disinformation

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Post-truth, Hoaks, Disinformasi

Abstract
The development of digital technology has magnified the phenomenon of disinformation, giving birth to the post-truth era, where emotions and personal beliefs influence public opinion more strongly than objective facts, creating a flood of false information (hoaxes) that is difficult to distinguish from the truth. In this era, truth no longer relies on facts, but on subjective perspectives. Hoaxes and fake news are spread widely through social media, making it difficult for people to distinguish between valid news and what is not. To deal with this phenomenon, citizenship education must build moral intelligence and character in the nation's generation. By teaching values such as critical and rational thinking, being responsible, being intelligent and making good use of information technology, citizenship education can help people become more aware and more selective in receiving information. Therefore, citizenship education must be an integral

part of efforts to combat disinformation and hoaxes, as well as build the morals and character of a better generation of the nation.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memperbesar fenomena disinformasi, melahirkan era post-truth, di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih kuat memengaruhi opini publik daripada fakta objektif, menciptakan banjir informasi palsu (hoaks) yang sulit dibedakan dari kebenaran. Dalam era ini, kebenaran tidak lagi bersandar pada fakta, melainkan pada perspektif subjektif. Hoaks dan berita palsu tersebar luas melalui media sosial, membuat masyarakat sulit membedakan mana berita yang valid dan mana yang tidak. Untuk menghadapi fenomena ini, pendidikan kewarganegaraan harus membangun kecerdasan moral dan karakter pada generasi bangsa. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti berpikir kritis dan rasional, bertanggung jawab, bersikap cerdas dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu masyarakat menjadi lebih aware dan lebih selektif dalam menerima informasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi bagian integral dalam upaya memerangi disinformasi dan hoaks, serta membangun moral dan karakter generasi bangsa yang lebih baik.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Zahra Dwi Pusparini, Hikma Paujia, Vera Dewi Saputri, Hanifa Anan. "Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Strategi Counter Disinformation di Era Post-Truth", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 873-887.
<https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Zahra Dwi Pusparini, Hikma Paujia, Vera Dewi Saputri, Hanifa Anan



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang sangat penting dalam membantu masyarakat memahami dan menanggapi berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu masyarakat memahami dan menanggapi berbagai informasi yang diterima melalui media sosial dan internet

Namun, dalam era post-truth, pendidikan kewarganegaraan harus dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang sesuai untuk menghadapi disinformasi dan hoaks yang berbahaya. Era post-truth adalah suatu fenomena di mana kebenaran tidak lagi bersandar pada fakta melainkan pada perspektif subjektif. Dalam situasi seperti ini, masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan tidak jujur, sehingga perlu adanya upaya yang lebih efektif untuk menangkal disinformasi dan hoaks.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran kunci dalam menangkal disinformasi dan hoaks. Dalam pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diajarkan untuk memiliki pemahaman dan pemikiran yang kritis terhadap suatu hal. Mereka juga diajarkan untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang sesuai untuk menghadapi disinformasi dan hoaks, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif, dan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebaik

mungkin

Oleh karena itu, Fenomena post-truth berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari diskursus politik hingga pengambilan keputusan pribadi. Dalam konteks politik, era post-truth telah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga demokratis, seperti media arus utama dan lembaga pemerintahan, yang seringkali dituduh menyebarkan "hoax" atau informasi yang bias (Buchanan & Kaye, 2022).

Hal ini dapat menyebabkan polarisasi politik yang semakin meningkat, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda semakin sulit untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan mencapai konsensus. Selain itu, era post-truth juga menimbulkan tantangan dalam proses pemilihan umum, di mana penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan melemahkan integritas demokrasi. Dampak era post-truth juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan banyaknya informasi yang tersedia di internet dan media sosial, individu seringkali kesulitan untuk membedakan antara fakta dan fiksi, serta rentan terhadap manipulasi emosional dan psikologis.

Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat, baik dalam konteks pribadi maupun profesional, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial akibat perbedaan persepsi dan keyakinan yang didasarkan pada informasi yang salah.

Menurut Erlande & Sapriya (2022) dan Murdiono et al., (2020) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya mengubah gaya hidup tetapi juga dunia pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menangkal disinformasi dan hoaks, serta meningkatkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membantu masyarakat memahami dan menangkal disinformasi dan hoaks.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan memahami fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data yang tidak berbentuk angka melainkan narasi atau deskripsi (Strauss dan Corbin., 1990). Pendekatan ini menghasilkan data naratif dan tekstual yang berisi pemahaman mendalam tentang pengalaman, sikap, dan persepsi individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu (Creswell., 2014). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono., 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan diambil dari istilah *civic education* dan sebagian pakar diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah Pendidikan kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*), sedangkan istilah pendidikan kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin. S.

Winataputra, dan Tim CICED (*Center Indonesian for Civic Education* (Winataputra,2012). Soemantri (2001) mengemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut Azis Wahab, pendidikan Kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secarasadar, cerdas, dan penuh tanggungjawab.

Menurut Azra (2000), pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia. Sementara itu, Zamroni (2001) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Pengertian lain didefinisikan oleh Merphin Panjaitan (1998), bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi Warga Negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Sementara Soedijarto (1996) mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi Warga Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang cakupannya lebih luas dari sekadar pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang kritis, demokratis, partisipatif, dan dewasa secara politik.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang cerdas, kritis dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membangun karakter yang kuat, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menjalankannya. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Melatih untuk berpikir secara kritis dan analitis dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Era Digital

Istilah era digital dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi (Nisya Nur Rahma, 2021). Perubahan teknologi yang diciptakan oleh manusia, membuat segala aktivitas menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Terlebih dengan berkembangnya jaringan internet dan ditemukannya ponsel pintar (*smartphone*) menyebabkan semakin banyak aktivitas bisa dilaksanakan hanya dalam genggaman. Perkembangan teknologi dengan perangkat yang serba elektronik sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat sehari-hari.

Di era digital, teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah membentuk cara berpikir, norma, serta nilai-nilai masyarakat (Kartini & Anggraeni Dewi, 2021). Perubahan ini membawa dinamika baru berupa pergeseran cara berkomunikasi, meningkatnya kemudahan akses informasi, serta terbentuknya ekosistem digital yang semakin kompleks. Kemampuan untuk terhubung secara instan, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi secara cepat telah memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir, kehidupan sosial dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat (Yasila & Ulfatun Najicha, 2022). Perkembangan era digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial (Yasila & Ulfatun Najicha, 2022). Media sosial serta berbagai platform digital kini menjadi sarana utama bagi individu dalam bertukar informasi, berkomunikasi, dan membentuk pandangan (Kartini & Anggraeni Dewi, 2021). Proses penyebaran informasi pun berlangsung secara cepat dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam percakapan berskala global (Yasila & Ulfatun Najicha, 2022).

Meski menawarkan kemudahan, era ini juga diiringi dengan tantangan serius, seperti ancaman terhadap keamanan data, pelanggaran privasi, serta maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, yang menjadi isu penting di kalangan masyarakat digital saat ini (Kartini & Anggraeni Dewi, 2021). Selain itu, salah satu tantangan di era digital adalah fenomena post-truth, di mana disinformasi dan hoaks menyebar dengan mudah melalui media sosial (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, et al., 2025).

Era post-truth dan tantangannya

Era *post-truth*, sebuah istilah yang semakin sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir, menggambarkan fenomena di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosional dan keyakinan pribadi (Ghosh & Jing, 2020). Dalam era ini, kebenaran seringkali dianggap sebagai konsep yang relatif dan subjektif, di mana individu cenderung memilih "kebenaran" yang sesuai dengan pandangan dunia dan kepentingan mereka sendiri, terlepas dari bukti yang ada. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi digital, meningkatnya polarisasi politik dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tradisional.

Di era post-truth saat ini, di mana batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi suatu hal yang semakin kabur atau dengan istilah lain tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Pendidikan kewarganegaraan menghadapi sebuah tantangan yang semakin kompleks dalam membekali warga negara dengan keterampilan dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lanskap memperoleh informasi yang membingungkan (Erlande & Chotimah, 2023, Mustain Nasoha, et al., 2024).

Salah satu karakteristik utama era post-truth adalah meningkatnya penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, seringkali melalui media sosial dan platform digital lainnya. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di era digital telah menciptakan lingkungan di mana berita palsu, teori konspirasi, dan informasi yang menyesatkan dapat menyebar secara viral dalam hitungan jam atau bahkan menit (Buchanan & Kaye, 2022).

Algoritma media sosial, yang dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna, juga dapat memperkuat "gelembung filter" di mana individu terus-menerus terekspos pada informasi yang menegaskan pandangan mereka, sambil mengisolasi mereka dari perspektif yang berbeda.

Era post-truth emosi dan keyakinan pribadi seringkali memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan fakta dan alasan. Individu cenderung mencari informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya (bias konfirmasi) dan menolak informasi yang bertentangan dengan pandangan mereka (disonansi kognitif). Akibatnya, diskusi publik seringkali didominasi oleh retorika yang provokatif dan polarisasi, di mana kelompok dengan pandangan yang berbeda semakin sulit untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan berbasis fakta.

Fenomena post-truth juga ditandai dengan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga dan otoritas tradisional, seperti media arus utama, lembaga akademik, dan lembaga pemerintahan. Dalam iklim ketidak percayaan ini, individu cenderung mencari sumber informasi alternatif yang sesuai dengan pandangan mereka, termasuk situs webpartisan, forum online, dan influencer media sosial(Heggart, 2021). Hal ini dapat memperdalam polarisasi dan mempersulit upaya untuk membangun konsensus dan pemahaman bersama tentang isu-isu penting.

Dampak era post-truth terhadap demokrasi sangat mengkhawatirkan. Ketika diskursus publik semakin didominasi oleh emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta dan alasan, kualitas debat politik dan pengambilan keputusan dapat menurun secara signifikan. Polarisi politik yang semakin meningkat dapat menyebabkan kebuntuan politik dan melemahkan kemampuan lembaga-lembaga demokratis untuk mengatasi masalah-masalah mendesak (Henderson & Tudball, 2019). Selain itu, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan selama periode pemilihan dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan melemahkan integritas proses demokrasi.

Menghadapi tantangan era post-truth,pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Sistem pendidikan harus beradaptasi untuk membekali siswa dengan keterampilan dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lingkungan informasi yang kompleks dan sering kali membingungkan ini. Pendidikan kewarganegaraan, secara khusus, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan warga negara yang terdidik, terlibat, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era post-truth (Peterson & Bentley, 2020).

Upaya untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ini juga menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan harus terus beradaptasi dengan lanskap informasi yang terus berubah dan perkembangan teknologi yang pesat, sambil juga mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan globalisasi, menuntut pendekatan pengajaran yang inovatif dan responsif.

Meskipun demikian, potensi pendidikan kewarganegaraan dalam membekali warga negara di era post-truth tidak dapat diabaikan. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, literasi media, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran kunci dalam membentuk warga negara yang mampu menghadapi tantangan era post-truth dengan kepercayaan diri, ketahanan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis.

3.2. Pembahasan

Strategi Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Post-Truth

Menghadapi tantangan era post-truth, pendekatan pengajaran dalam

pendidikan kewarganegaraan perlu beradaptasi untuk membekali siswa dengan keterampilan dan perspektif yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang terdidik, terlibat dan tangguh.

1. Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis

Salah satu keterampilan inti yang harus dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan di era post-truth adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan analisis yang cermat terhadap informasi, argumen, dan bukti, serta kemampuan untuk mengevaluasi keandalan dan relevansi sumber informasi (Heggart, 2021). Untuk mengembangkan keterampilan ini, guru dapat menerapkan berbagai strategi seperti:

- a. Mengajarkan cara mengevaluasi sumber informasi: Siswa perlu dibekali dengan alat dan kriteria untuk menilai kredibilitas sumber informasi, seperti mempertimbangkan reputasi penulis atau organisasi, memeriksa tanggal publikasi, dan mengidentifikasi potensi bias atau konflik kepentingan. Latihan praktis, seperti analisis artikel berita atau situs web, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan ini.
- b. Mendorong analisis kritis terhadap argumen dan bukti: Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk secara kritis menganalisis argumen dan bukti yang disajikan dalam berbagai bentuk media, seperti pidato politik, iklan kampanye, atau posting media sosial. Siswa dapat diminta untuk mengidentifikasi premis, mengevaluasi logika, dan mempertanyakan asumsi yang mendasari argumen tersebut.
- c. Memfasilitasi diskusi yang mendalam dan reflektif: Diskusi kelas yang mendalam dan reflektif dapat membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dengan mengeksplosi mereka pada berbagai perspektif dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Guru dapat menggunakan teknik seperti Socratic Seminar atau debat terstruktur untuk memfasilitasi pertukaran ide yang bermakna dan berbasis bukti

2. Mempromosikan Literasi Media dan Digital

Sejumlah penelitian menekankan bahwa literasi digital perlu diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya misinformasi (Wibowodkk.,2022). Pendidikan karakter berlandaskan Pancasila memperkuat ketahanan moral siswa terhadap disinformasi (Setiawan & Yuliawati, 2021). Teori pendidikan karakter Lickona (*knowing,feeling,acting*) menjadi kerangka dalam menginternalisasi nilai hingga tercermin dalam tindakan nyata (Kurniawan & Fitriyani, 2023). Mahasiswa, berperan ganda sebagai konsumen sekaligus produsen informasi yang harus menyalurkan pengetahuan akurat kepada masyarakat dengan komunikasi etis (Argo, 2022).

Di era post-truth, di mana banyak informasi disebarluaskan melalui platform digital, mengembangkan literasi media dan digital menjadi semakin penting. Literasi media melibatkan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat konten media dalam berbagai bentuk (Buchanan & Kaye, 2022).

Tantangan dalam Menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan yang Efektif

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya: Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif adalah keterbatasan waktu

dalam kurikulum yang sudah padat dan tuntutan yang bersaing dari berbagai mata pelajaran. Guru seringkali merasa kesulitan untuk menemukan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi isu-isu kewarganegaraan secara mendalam atau menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti akses ke teknologi atau bahan ajar yang berkualitas, juga dapat menjadi hambatan (Peterson & Bentley, 2020).

2. Resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran: Menerapkan pendekatan pengajaran baru atau strategi pedagogis yang inovatif dapat menimbulkan resistensi dari beberapa guru yang mungkin merasa nyaman dengan metode tradisional. Keengganan untuk keluar dari zona nyaman atau kekurangan waktu dan dukungan untuk pengembangan profesional dapat menghambat adopsi praktik-praktik terbaik dalam pendidikan kewarganegaraan (Buchanan & Kaye, 2022).
3. Kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi: Era post-truth ditandai dengan isu-isu yang sangat kompleks dan dinamis, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, atau polarisasi politik. Mengajarkan topik-topik ini secara efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam, keterampilan pedagogis yang kuat, dan kemampuan untuk mengelola diskusi yang sensitif. Guru mungkin merasa kurang percaya diri atau kurang siap untuk mengatasi kompleksitas ini di dalam kelas (Heggart, 2021).

Berdasarkan data di atas, tantangan dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif terletak pada keterbatasan waktu dan sumber daya, yang dimana keterbatasan waktu dalam kurikulum yang sudah padat dan tuntutan yang bersaing dari berbagai mata pelajaran. Kemudian, resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran, yang dimana menerapkan pendekatan pengajaran baru atau strategi pedagogis yang inovatif dapat menimbulkan resistensi dari beberapa guru yang mungkin merasa nyaman dengan metode tradisional. Selanjutnya, kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi, yang dimana era post-truth ditandai dengan isu-isu yang sangat kompleks dan dinamis, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, atau polarisasi politik. Menjadi sebuah tantangan untuk mengajarkan topik-topik ini secara efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam.

Peluang untuk Memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: Tantangan era post-truth menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pendidikan kewarganegaraan. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, organisasi masyarakat, media, dan lembaga pemerintah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan menyediakan sumber daya dan keahlian tambahan. Misalnya, kolaborasi dengan organisasi fact-checking atau outlet media lokal dapat memberikan wawasan praktis tentang literasi media dan verifikasi informasi (Ghosh & Jing, 2020).
2. Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran: Kemajuan teknologi juga menyajikan peluang yang menarik untuk meningkatkan relevansi dan dampak pendidikan kewarganegaraan. Mengintegrasikan alat dan platform digital, seperti media sosial, aplikasi pembelajaran interaktif, atau kursus online, dapat membantu menjangkau dan melibatkan siswa dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Teknologi juga dapat memfasilitasi kolaborasi, pertukaran ide, dan akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas (Henderson & Tudball,

2019).

3. Pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru: Investasi dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan dampak pendidikan kewarganegaraan. Menyediakan pelatihan, lokakarya, dan peluang untuk berbagi praktik terbaik dapat membantu guru tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru, mengasah keterampilan pedagogis mereka, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengatasi isu-isu kompleks. Pengembangan profesional juga dapat mendorong budaya inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam praktik pengajaran (Buchanan & Kaye, 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa peluang untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan diantaranya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dimana tantangan era post-truth menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pendidikan kewarganegaraan. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, organisasi masyarakat, media, dan lembaga pemerintah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan menyediakan sumber daya dan keahlian tambahan.

Kemudian, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran, yang dimana kemajuan teknologi juga menyajikan peluang yang menarik untuk meningkatkan relevansi dan dampak pendidikan kewarganegaraan. Mengintegrasikan alat dan platform digital, seperti media sosial, aplikasi pembelajaran interaktif, atau kursus online, dapat membantu menjangkau dan melibatkan siswa dengan cara yang lebih menarik dan efektif.

Selanjutnya, pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru, yang dimana investasi dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan dampak pendidikan kewarganegaraan. Guna memanfaatkan peluang-peluang ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pemimpin sekolah, guru, orang tua, dan siswa sendiri. Menciptakan visi bersama dan komitmen yang kuat terhadap pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas tinggi sangat penting untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan potensi penuhnya.

Selain itu, penting juga untuk secara berkala mengevaluasi dan merefleksikan efektivitas pendekatan dan strategi pengajaran, serta bersedia untuk menyesuaikan dan berinovasi sesuai kebutuhan. Mengumpulkan data, mencari umpan balik dari siswa dan pemangku kepentingan, serta berbagi wawasan dan pelajaran yang dipetik dapat membantu meningkatkan praktik secara terus-menerus.

Dengan menghadapi tantangan secara proaktif dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, kita dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan membekali generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang terdidik, terlibat, dan tangguh dalam era post-truth. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi dengan upaya kolaboratif, dedikasi, dan komitmen terhadap perbaikan terus-menerus, kita dapat membuat kemajuan yang berarti dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Era post-truth, yang ditandai dengan meningkatnya penyebarluasan informasi yang salah atau menyesatkan, pengaruh emosi dan keyakinan pribadi dalam pengambilan keputusan, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga dan otoritas tradisional, telah muncul sebagai salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi masyarakat demokratis saat ini (Kavanagh & Rich, 2018). Fenomena ini menimbulkan ancaman

serius terhadap diskursus publik yang berbasis fakta, meningkatkan polarisasi politik, dan melemahkan integritas proses demokrasi (Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017).

Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam membekali warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lanskap informasi yang kompleks dan sering kali membingungkan (Mihailidis & Viotty, 2017).

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggulangi Disinformasi dan Hoaks

Kata hoax jika ditelusuri dari sejarah asal katanya pertamakali populer digunakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap digunakan oleh para pesulap yakni "*hocus pocus*". Istilah *hocus pocus* sendiri pertamakali muncul awal Abad ke-17. Kata tersebut, diambil dari nama pesulap yang kerap menyebut sendiri namanya dengan julukan '*The King Majesties most excellent Hocus Pocus*' karena dalam setiap penampilannya menggunakan beragam trik sulap, dia selalu melaftalkan ucapan atau mantra "*hocus pocus, tontus talontus, vade celeriter jubeo*". Pesulap yang terkenal berikutnya menggunakan frase "*Hax pax max dues adimax*". Jenis-jenis hoax yang paling sering muncul pada Pemilu dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya di masing-masing negara. Namun, beberapa jenis hoax yang umumnya muncul pada Pemilu antara lain: Hoax tentang calon atau partai politik:

Informasi palsu atau tidak benar tentang calon atau partai politik dapat disebarluaskan oleh pihak-pihak yang ingin mempengaruhi opini publik atau memperoleh keuntungan politik. Hoax tentang hasil pemilu: Informasi palsu tentang hasil pemilu dapat menciptakan ketidakpastian dan ketegangan di masyarakat, serta dapat mempengaruhi hasil pemilu dengan membuat orang-orang tertentu tidak datang ke TPS. Dalam jangka panjang, dampak dari penyebaran hoax pada Pemilu dapat merusak demokrasi secara keseluruhan. Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang akurat dan benar dapat kehilangan kepercayaan pada proses politik dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam demokrasi (Heryanto, 2018). Akibatnya, partisipasi politik dan partisipasi dalam proses demokrasi dapat menurun, yang dapat mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Penyebaran hoax pada Pemilu dapat memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan demokrasi secara umum. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain:

1. Menurunkan kualitas informasi politik: Penyebaran hoax dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat dan tidak berdasar. Hal ini dapat menurunkan kualitas informasi politik yang diterima oleh masyarakat dan mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh mereka.
2. Memperkuat polarisasi: Penyebaran hoax dapat memperkuat polarisasi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan konflik politik yang semakin memperdalam perpecahan masyarakat.
3. Memicu ketidakpercayaan terhadap institusi dan proses demokrasi: Penyebaran hoax dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan proses demokrasi. Mereka mungkin merasa bahwa pemilu tidak adil atau transparan, dan bahwa pihak yang berwenang tidak dapat dipercaya.
4. Meningkatkan risiko kekerasan politik: Penyebaran hoax dapat memicu konflik dan kekerasan politik. Masyarakat yang terprovokasi oleh informasi yang tidak benar dapat melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk protes atau balas dendam.

5. Meningkatkan kerentanan terhadap pengaruh asing: Penyebaran hoax juga dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap pengaruh asing yang mencoba mempengaruhi hasil pemilu atau kebijakan politik.

Pada era digitalisasi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, terutama saat Pemilu hoaks biasanya tersebar dengan cepat dan masif. Hoaks Pemilu menjadi permasalahan krusial yang harus segera diatasi karena merusak pikiran masyarakat, merusak citra lawan politik, menciptakan fragmentasi sosial, dan memunculkan kegelisahan publik yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan kepada pihak otoritas, menurunkan integritas dan nilai Demokrasi. Oleh sebab itu, Penyelenggara Pemilu serta stakeholder perlu menyusun strategi untuk menangani hoaks yang sangat cepat berkembang terutama di internet dan media sosial.

Beberapa teori dan penelitian terdahulu mendefinisikan hoaks sebagai berita palsu atau informasi belum pasti kebenarannya, yang dapat membentuk opini publik. Penelitian ini dikemukakan oleh Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017), Situngkir, H. (2017), Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017), Siswoko, K. H. (2017), Walsh, L. (2006) dan Juditha, C. (2018). Penelitian tersebut sepakat bahwa penyebaran hoaks tertinggi terjadi di media sosial karena informasi disampaikan oleh pengguna secara langsung tanpa penyaringan, penilaian dan pemeriksaan fakta, termasuk penyebaran berita palsu dalam Pemilu. Perkembangan hoaks semakin terbuka lebar dan tak terkendali seiring dengan kebebasan media dan berpendapat untuk menciptakan Pemilu yang demokratis.

Pada era demokratisasi masyarakat bebas menyampaikan pendapat, mendukung dan mengkritik peserta Pemilu, salah satunya melalui media sosial. Media ini juga digunakan oleh penyelenggara Pemilu untuk memberikan literasi dan sosialisasi, sementara peserta Pemilu menggunakan media sosial untuk menyampaikan program dan gagasan serta membangun citra diri. Hal ini menyebabkan media sosial memegang peran strategis untuk mentransfer informasi, penyampaian aspirasi, dan pendidikan pemilih. Mudah dan murahnya penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi menyebabkan terus meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia.

Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang Pemilu dan mudah terpengaruh oleh berita palsu yang tersebar di media sosial. Dikatakan oleh Septanto (2018) bahwa hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk cybercrime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan, tetapi berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Kedua pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa hoax dapat dikatakan sebagai pembunuhan karakter dalam bentuk cyber crime. Sejalan dengan era post truth ini, Syuhada (2018) menyampaikan sebuah isu menyangkut media bahwa dunia sekarang pada masa yang mengkhawatirkan dengan sirkulasi peredaran berita yang dipelintir dan informasi palsu yang beredar melalui media sosial terutama dalam sorotan ini adalah facebook dimana perusahaan ini mendapatkan untung besar karena persebaran berita negatif yang ada di lini masa facebook.

Meskipun demikian hampir semua media sosial mengalami hal yang sama bahwa berita bohong atau hoax semakin menyebar dalam lingkungan media sosial. Dalam era digital yang semakin kompleks, disinformasi dan hoaks menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat memicu perpecahan, polarisasi, dan bahkan kekerasan. Di sinilah peran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat krusial. Sebelum membahas peran PKn, penting untuk memahami apa itu disinformasi dan hoaks. Disinformasi adalah informasi yang

sengaja dibuat salah untuk menyesatkan orang lain, sedangkan hoaks adalah informasi palsu yang disebarluaskan secara cepat dan luas.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks. beberapa peran penting PKn yaitu menumbuhkan Kritis: PKn mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Dengan kemampuan ini, siswa dapat mengevaluasi informasi yang mereka terima, membedakan fakta dan opini, serta mendeteksi informasi yang tidak kredibel, memupuk Literasi Digital: PKn dapat menjadi wadah untuk membekali siswa dengan literasi digital. Siswa diajarkan untuk mencari sumber informasi yang kredibel, mengecek fakta, dan menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar, menanamkan Nilai-nilai Demokrasi: PKn mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi kebenaran.

Nilai-nilai ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang memecah belah, meningkatkan kewarganegaraan yang bertanggung jawab: PKn mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah menyebarkan informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks, dan membangun Kepercayaan terhadap Institusi: PKn mengajarkan siswa tentang pentingnya lembaga-lembaga negara dan peran mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memahami peran lembaga-lembaga ini, siswa akan lebih mudah membedakan informasi yang benar dan yang tidak.

Dengan itu pengoptimalkan peran PKn dalam menanggulangi disinformasi, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memperkuat kurikulum PKn. kurikulum PKn perlu diperkaya dengan materi-materi yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi, simulasi, dan proyek untuk meningkatkan pemahaman siswa,

Dengan memberikan contoh kasus nyata guru dapat memberikan kasus tentang disinformasi dan hoaks yang terjadi di masyarakat, memanfaatkan teknologi, dimana guru dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa belajar tentang literasi digital, kolaborasi dengan pihak Lain yakni sekolah dapat bekerja sama dengan media, organisasi masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya disinformasi.

4. KESIMPULAN

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang berpengetahuan, berpikiran kritis, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran penting dalam membekali peserta didik dengan nilai-nilai dasar kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan literasi digital yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era disinformasi dan hoaks.

Disinformasi dan hoaks memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi, terutama dalam proses pemilu, dengan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, memperkuat polarisasi sosial, dan menurunkan kualitas debat politik. Penyebaran informasi palsu secara cepat dan luas melalui media sosial berpotensi mengacaukan persepsi publik dan memicu konflik sosial.

PKN berperan strategis dalam menanggulangi masalah ini dengan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, membedakan fakta dan opini, serta memupuk nilai-nilai

demokrasi seperti toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepercayaan terhadap lembaga negara dan menanamkan sikap bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang benar.

Untuk mengoptimalkan peran PKN, diperlukan penguatan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan metode pembelajaran aktif, serta kolaborasi antara sekolah, masyarakat, media, dan pemerintah. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk generasi muda yang cerdas bermedia, kritis, dan mampu menjaga integritas demokrasi di era digital dan post-truth.

DAFTAR PUSTAKA

- Addzaky, K. U., Hasanah, U., & Syarif Zain, Z. F. (2024). Developing Wasathiyah Epistemology: A Literature-Based Study of Moderate Islamic Knowledge in The Post-Truth <https://doi.org/10.14421/hjie.2024.42-05>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Adiningrum Dwi Nugraheni, Muhammad Rasyid Ridho, & Muhammad Arifin Aprilianto. (2025, Mei 14). Pancasila digital: Strategi komunikasi dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan di era media sosial. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 137-152. <https://appisi.or.id>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aisha Arista Widiya, Rismaya Wulandari, Riski Muhamad Sholeh Triatmojo, & Ardiyan Nugraheni. (2024, November 28). Peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dinamika sejarah dan perkembangannya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 379-395. <https://nalandia.ac.id>
- Al Khansa, J. N., Agilda, N., Maivuni, I., & Azzahroh, N. I. (2024). Pendidikan kewarganegaraan di era post-truth: Menangkal disinformasi dan hoaks. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 231-253. <https://ojsid.my.id>
- Al Khansa, J. N., Maivuni, N. A. I., & Azzahroh, N. I. (2024). Pendidikan kewarganegaraan di era post-truth: Menangkal disinformasi dan hoaks. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 231-253. <https://ojsid.my.id>
- Armawi, A. (2020). Reduksi Informasi Hoax di Era Digital Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1). <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44897>
- Azmi, S. (2016). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. <https://share.google/cWl4VRDhXDv0AXaVn>
- Citra, M. M., & Irawan, A. (2025, 14 Maret). Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*. <https://fh.untar.ac.id/2025/03/14/penyebaran-berita-bohong-hoax-bisa-berakibat-hukuman-pidana/>
- Damm, D., & Putra, F. E. (2020). Pendidikan kewarganegaraan (Edisi pertama). Kencana.
- Diantini, N., & Purwanti. (2025). Berpikir Kritis Dalam Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Digital. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 830-837. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.110>
- Erlande, R., Komalasari, K., Taufika, R., Hardian, M., Fauzan, A., Maharam, A., & Permatasari, M. (2024). Membekali warga negara di era post-truth: Peran krusial

- pendidikan kewarganegaraan di Australia. ASANKA: Journal of Social Science and Education, 5(1), 61–78. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/asanka>
- Erlande, R., Komalasari, K., Taufika, R., Hardian, M., Fauzan, A., & Maharani, A. (2024). Membekali warga negara di era post-truth: Peran krusial pendidikan kewarganegaraan di Australia. ASANKA: Journal of Social Science and Education, 5(1), 61–78. <https://doi.org/10.21154/asanka.v5i1.9097>
- Fauzi, I., & Srikantono. (2013). Pendidikan kewarganegaraan (Civil education). SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial.” <https://share.google/p4wWpAVnahrEsZgwr>
- Jujur, A. P., Raditia, T., Rahmada, A., & Maulana, P. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai strategi mencegah hoaks kesehatan di kalangan mahasiswa keperawatan. Cepat dalam Ilmu Sosial, 1(2), 1–7. <https://fast-socialsciences.com>
- Khoir, Q. (2024). Pancasila sebagai paradigma pendidikan karakter di era post-truth: Mengatasi kontradiksi informasi hoaks dan nilai kebenaran. AJMIE: Jurnal Alhikam Pendidikan Islam Multidisiplin, 5(2), 170–181. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id>
- Khoir, Q. (2024). Pancasila sebagai paradigma pendidikan karakter di era post-truth: Mengatasi kontradiksi informasi hoaks dan nilai kebenaran. Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education, 5(2). STIS Nurul Qarnain Jember.
- Khoir, Qoidul. (2024). Pancasila sebagai paradigma pendidikan karakter di era post-truth: Mengatasi kontradiksi informasi hoaks dan nilai kebenaran. AJMIE: Jurnal Alhikam Pendidikan Islam Multidisiplin, 5(2), 170–181. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id>
- Naibaho, L., Andriani, J., Nainggolan, N. M., Hutapea, N. M., Lumban Tohing, S., & Bangun, D. Y. B. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks di era media sosial pada kampanye pemilihan umum tahun 2024 perspektif siswa/i SMA Swasta Eria Medan. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(4). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrp>
- Naibaho, L., Nainggolan, J. A., Hutapea, N. M., Lumban Tobing, S., Bangun, D. Y., & Rachman, F. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks di era media sosial pada kampanye pemilihan umum tahun 2024 perspektif siswa/i SMA Swasta Eria Medan. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(4), 15269. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Ningrum, UD, M. Thoriq Syahdan, Indra Wandi Ritonga, & Sari, HP (2025). Penguatan Pendidikan Islam di Era Post-Truth: Peran Literasi Media dalam Menangkal Distorsi Informasi. Robbayana: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 3 (1), 1–16. Diambil dari <https://journal.attaqwa.ac.id/index.php/Robbayana/article/view/69>
- Puteri, F. A.-Z., Balqis, M. B., Setiawan, D., Choirunnisa, M. S., Manusatun Nadia, I., & Rheinsalazar, S. F. (2025). Peran content creator sebagai agen bela negara dalam menangkal disinformasi: Studi kasus konten Ferry Irwandi. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, 2(3), 29–35. <https://doi.org/10.69714/6eec1s75>

- Rianissa, S. N. (2025). Disinformasi di era post-truth: Ancaman terhadap demokrasi dan mobilitas global. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* <https://share.google/0cSHnWjW1spv46fx3>
- Sumarsono, S., Mansyur, H. H., Ciptadi, T., & Sobana, H. A. (2006). Pendidikan kewarganegaraan. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Taganova, G. B., Shukhratova, K., & Aminova, M. (2024). Literasi informasi dan media dalam pendidikan: Meningkatkan pembelajaran, pemikiran, dan nilai-nilai di era digital. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 255–260. <https://ejournal.upi.edu>
- Wibowo, A. S. P., Assyifa, A. E., & Amiarti, M. (2024). Pentingnya Pendidikan Pancasila untuk Membangun Karakter Siswa dalam Menghadapi Masalah Hoax. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.482>